

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (ranhir renstra)



DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI JAMBI

2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya Jualah Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Secara substantif, Renstra Dinas Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu “*Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT*” atau “Jambi Mantap 2029”.

Rencana Strategis Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jambi. Sebagai salah satu pilar bagi terwujudnya masyarakat cerdas, berdaya saing, dan akuntabilitas pemerintahan.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi acuan kerja bagi semua para pihak, terutama unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Acuan dan pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan program peningkatan mutu dan kinerja kapasitas kelembagaan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini diharapkan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan melalui partisipasi aktif dalam mengawal dan menopang semua kegiatan dan program pembangunan bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jambi,

2025

KEPALA DINAS,



Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 197306241994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.2. Permasalahan Perangkat Daerah	
2.3. Isu Strategis Perangkat Daerah	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
3.1. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	28
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	30
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	34
4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	
4.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Urusan Pemerintahan.....	7
Tabel 2.2	Jumlah SDM Dinsosdukcapil	17
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana penunjang	18
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
Tabel 2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan	34
Tabel 2.6	Capaian SPM Dinas	40
Tabel 2.7	Teknik menyimpulkan Isu Strategis PD	46
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	49
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	50
Tabel 3.3	Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra PD	50
Tabel 4.1	Teknik merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD	52
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	62
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	66
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	73
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur organisasi	10
Gambar 3.1	Konsep Renstra OPD	47
Gambar 3.2	Kerangka keterkaitan RPJMD dengan tujuan Renstra PD	48
Gambar 4.1	Kerangka rumusan program/kegiatan/Subkegiatan	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara legalitas formal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Terdapat 2 urusan yang mendasari terbentuknya perangkat daerah ini antara Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu Urusan Sosial dan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yaitu Urusan Administrasi Kependudukan. Penggabungan kedua urusan ini menjadi satu organisasi perangkat daerah secara historis dilatar belakangi oleh keinginan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial perlu didukung dengan akurasi data kependudukan yang valid, akurat dan akuntabel, sehingga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama dalam percepatan pengentasan kemiskinan daerah diharapkan akan tepat sasaran. Oleh karenanya sebagai Organisasi Perangkat Daerah maka wajib memiliki rencana strategis sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan roda organisasi.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pengertian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2025 – 2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024-2029.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
20. Instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi; dan
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

- a. menjadi dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menjadi pedoman untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi; dan
- c. menjadi dasar atau tolok ukur dalam penilaian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan gambaran lengkap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama lima (5) tahun yang akan datang.
2. Memberikan jaminan ketercapaian penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan integrasi, sinergi diantara pelaku pembangunan dibidang Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil di provinsi Jambi.
4. Memberikan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan sosial dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra PD ahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengumumkan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rentsra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengumumkan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rentsra Perangkat Daerah ini.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.1.2. SDM Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3. Asset/Modal

Menyajikan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki perangkat daerah sebagai sumberdaya dalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat.

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan (Tingkat capaian kinerja PD) 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dan data lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis secara deskriptif dan diagnostic.

2.1.5. Kelompok sasaran layanan perangkat daerah

Menjelaskan Gambaran kelompok sasaran yang menjadi targer pelayanan urusan bidang sosial dan urusan bidang admindukcapil

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam pelayanan

Menjelaskan tentang organisasi pusat maupun daerah yang selalu berkolaborasi dalam menunjang peningkatan pelayanan perangkat daerah.

2.2. Permasalahan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan pada Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD

2.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Mengidentifikasi isu strategis sesuai Lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi PD, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN Tahun 2025-2029, Rensra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/Lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berisi perumusan tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan NSPK RPJMD tahun 2025-2029.

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Memberikan Gambaran terhadap rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Rentsra PD

3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah

Menjelaskan terhadap arah kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Menguraikan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan pendanaan serta target dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Menggambarkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Menggambarkan target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan terhadap kesimpulan penting dan kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang Sosial dan Bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil, disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pembagian Urusan Pemerintahan

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1	Pemberdayaan Sosial	a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi. c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	a. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah provinsi asal. b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (trafficking) dalam dan luar negeri.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired

		Deficiency Syndrome.	Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan Hukum
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan. c. Pengelolaan data fakir miskin nasional.	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional. b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota
	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
	Pendaftaran penduduk	a. Penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional. b. Pemberian Nomor Induk	-	Pelayanan pendaftaran Penduduk

		Kependudukan (NIK). c. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko KTP-El. d. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-El.		
	Pencatatan Sipil	a. Penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional. b. Penetapan spesifikasi blangko dokumen Pencatatan Sipil	-	Pelanayan Pencatatan Sipil
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional.	-	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
	Profil Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan nasional.	Penyusunan profile kependudukan Provinsi	Penyusunan profile kependudukan Kabupaten/Kota

Dari pembagian urusan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, sebagai landasan hukum berdirinya Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengemukakan bahwa Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial, kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.1.1.2. Fungsi

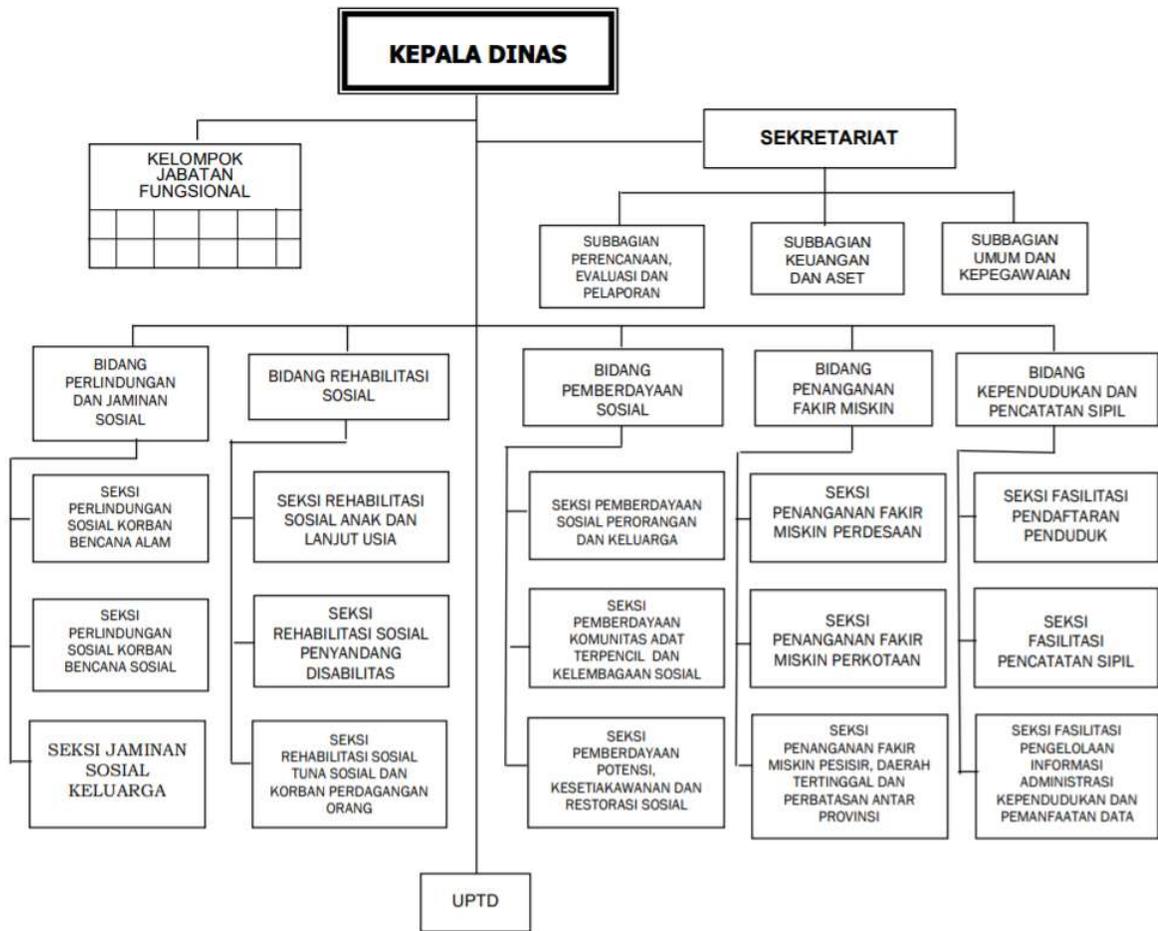
Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan fakir miskin dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
3. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan dinas;
5. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas yang membidangi sosial di kabupaten/kota;
6. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambar 1 : Struktur Organisasi



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas dikepalai oleh Seorang Sekretaris, yang membawahi: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang dan pengelolaan pelayanan sekretariat yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan penataan asset dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan, asset dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- g. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
- k. pelaksanaan koordinasi antar bidang dan kerja sama dengan SKPD terkait dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
- m. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Subbagian yaitu :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Subbagian Keuangan dan Asset
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi dan melaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan instansi terkait;
- h. pemberian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pelaporan hasil kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada atasan; dan

- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menungjang pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, sosialisasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b. pelaksanaan kebijakandi bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menungjang pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan operasional bidang pemberdayaan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakandi bidang pemberdayaan sosial;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menungjang pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan Dan Keluarga
2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pengkajian dan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penanganan fakir miskin. Untuk Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar provinsi;

- c. pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar provinsi;
- d. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan provinsi;
- e. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan perbatasan antar provinsi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir, daerah tertinggal dan perbatasan antar provinsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
3. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Daerah Tertinggal dan Perbatasan Antar Provinsi

6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- c. pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- d. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

- e. pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
- f. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menungjang pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Seksi Fasilitas Pendaftaran Penduduk
2. Seksi Fasilitas Pencatatan Sipil
3. Seksi Fasilitas Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unit Eselon III.B sebagai Kepala UPTD yang bertanggungjawab ke Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan fungsi rehabilitasi sosial pemerlu atensi sosial terlantar.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari ;

1. UPTD PSTW Budi Luhur, dengan Layanan Lanjut usia terlantar dalam panti
2. UPTD PSABWEB dengan layanan antara lain :
 - a. Layanan anak terlantar dalam panti
 - b. Layanan Disabilitas terlantar dalam panti
 - c. Layanan gelandangan dan pengemis dalam panti
 - d. Layanan tuni susila dalam panti
 - e. Multi layanan dalam panti

2.1.2. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi didukung aparatur sebanyak 227 orang dengan rincian ASN sebanyak 112 orang dan PTT berjumlah 115 Orang, secara rinci disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah SDM Dinas Sosial Kependudukan dan pencatatan Sipil

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	Jenis kelamin		Jenis Kepegawaian		Jabatan		
			L	P	ASN	PTT	Struktural	JFT	JFU
1	S2	23	12	11	11	1	18	2	2
2	S1	100	53	47	56	44	13	13	30
3	D3	24	6	18	6	18			
4	SMA	70	43	27	15	45			25
5	SMP	6	5	1	3	3			3
6	SD	4		4		4			
Jumlah			119	108	112	115			
Total		227	227		227		112		

Sumber : Data kepegawaian Tahun 2024

2.1.3. Asset/Modal

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan 2 urusan pemerintahan, tentunya Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosdukcipil hingga akhir tahun 2024 secara umum merupakan sarana dan prasarana peninggalan restrukturisasi Kanwil Sosial yang sudah cukup lama, terutama pada asset gedung dan Kendaraan operasional yang semestinya perlu dilakukan peremajaan.

Untuk memperoleh gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat, disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan prasarana penunjang

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	Jumlah	KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN			KET
			SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT	
1	2		7	8	9	10	11	12	13
	UPTD PSBAWEP Jl. Kapt Pattimura Jambi	35							
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1							
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			V		V		
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1							
	Bangunan Tempat Ibadah/Mushalla Permanen	1			V		V		
	BANGUNAN KESEHATAN	1							
	Bangunan Poliklinik	1			V		V		
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	5							
	Bangunan Pendidikan Pertukangan Kayu/Outomotif	1			V			V	
	Bangunan Pendidikan Praktek Elektro/Las	1						V	
	Bangunan Pendidikan Bengkel Outomotif Mobil	1			V		V		
	Bangunan Pendidikan Umum	1			V		V		
	Bangunan Pendidikan Keterampilan Menjahit dan Salon	1			V		V		
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	1							
	Bangunan Gedung/Aula	1			V		V		
	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	1							
	Garasi	1			V		V		
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	1							
	Bangunan Gedung/Dapur dan Ruang Makan	1			V			V	
	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	1							
	Pos Jaga	1			V			V	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	1							
	Gedung Sport Hall	1			V	V			
	BANGUNAN GUDANG	1							
	Bangunan Tempat Genset/Diesel	1			V			V	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	2							
	Bangunan Pintu Gerbang	1			V		V		
	pagar keliling	1			V			V	
	BANGUNAN FASILITAS UMUM	1							
	Bangunan tempat kuliner(kantin atau sejenisnya)	1			V		V		
	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	4							
	Mini Bus (penumpang 4 - 8 orang)	4			V		V	V	

KENDARAAN DINAS BERMOTOR BERODA DUA	1							
Sepeda Motor	1			√		√	√	
ALAT PENGOLAHAN AIR	1							
Depot air isi ulang	1			√		√		
MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	12							
Wisma/ cottage Mawar	1			√		√		
Wisma/ cottage Teratai	1			√		√		
Wisma/ cottage Seroja	1			√		√		
Wisma/Cottage Bougenvile	1			√		√		
Wisma Tamu	1			√			√	
Wisma/Cottage Anggrek	1			√		√		
Wisma/Cottage Asoka	1			√		√		
Wisma/Cottage Dahlia	1			√		√		
Wisma/Cottage Cempaka	1			√		√		
Wisma/Cottage Tanjung	1			√		√		
Wisma/Cottage Bougenvile	1			√		√		
Wisma/Cottage Melati	1			√		√		
UPTD PSBAWEP Talang Bakung Jambi	16							
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1							
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1							
Bangunan Tempat Ibadah/Mushalla Permanen	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	1							
Gedung Praktek Tata Boga Permanen	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	1							
Bangunan Gedung/Aula	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	1							
Bangunan Gedung/Dapur dan Ruang Makan	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	1							
Pos Jaga Keamanan UPTD PSBAWEP	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	1							
pagar keliling	1			√		√		
BANGUNAN TERBUKA	1							
Bangunan Selasar	1			√		√		
MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	6							

Wisma/Cottage Anggrek	1			√		√		
Wisma/Cottage Asoka	1			√		√		
Wisma/Cottage Dahlia	1			√		√		
Wisma/Cottage Cempaka	1			√		√		
Wisma/Cottage Tanjung	1			√		√		
Gedung Pendidikan Salon/Menjahit/ Asrama Disabilitas	1			√		√		
Bangunan Air/Irigasi	1							
Bangunan Sumur dalam	1			√		√		
KENDARAAN DINAS BERMOTOR BERODA TIGA	1							
Sepeda Motor BERODA TIGA	1			√		√		
UPTD PSBAWEP Sungai Buluh Kab Batang Hari	8							
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1							
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1			√		√		
Bangunan Tempat Ibadah/Mushalla Permanen	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	1							
Bangunan Gedung/Aula	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	1							
Bangunan Gedung/Dapur dan Ruang Makan	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	1							
Pos Jaga Keamanan UPTD PSBAWEP	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	1							
pagar keliling	1			√		√		
BANGUNAN TERBUKA	1							
Bangunan Selasar	1			√		√		
MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	1							
Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1			√			√	
UPTD PSTW Budi Luhur Jambi	27							
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1							
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			√		√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1							
Bangunan Tempat Ibadah/Mushalla Permanen	1			√		√		
BANGUNAN KESEHATAN	1							
Bangunan Poliklinik	1			√		√		

Sepeda Motor	1			√		√		
KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	1							
Mobil Ambulance	1			√		√		
ALAT PENGOLAHAN AIR	1							
Depot air isi ulang	1			√		√		
Dinas Jl A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi	36							
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	7							
Bangunan Gedung Kantor Permanen	7		√			√		
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1							
Bangunan Tempat Ibadah/Mushalla Permanen	1		√					
BANGUNAN GEDUNG TERTUTUP	1							
Gudang tertutup	1		√					
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	1							
pagar keliling	1		√					
BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	1							
Pos Jaga Keamanan	1		√					
KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7							
Mini Bus (penumpang 4 - 8 orang)	7		√	√		√		
KENDARAAN DINAS BERMOTOR BERODA DUA	18							
Sepeda Motor	18	√		√		√		
Total sarpras yang ada	122							
Jumlah sarpras yang dibutuhkan								

Sumber : Laporan Asset Dinsosdukcakil Tahun 2024

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Sosial Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kinerjanya. Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah secara umum digambarkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan serta Capaian kinerja keuangan.

Gambaran capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2022-2025, disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	48	48	48	48	48	48	48	48			100	100	100		
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	112	112	112	112	112	112	112	112			100	100	100		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20	20	20	20	15	4	12			75	20	60		

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100			
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4	4	4	4			100	100	100			
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100			
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	11	1	1	0	0	11			0	0	100			
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100			
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100			
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit																

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	18	18	18	18	18	18	18			100	100	100		
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																		
1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi																		
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	450	450	450	450	450	450	450	450			100	100	100		
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	144	144	144	144	144	144	144	144			100	100	100		
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Orang	549	549	549	549	549	549	549	549			100	100	100		
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	5	5	5	5	5	5	5	5			100	100	100		
III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																		
1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota																		
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	650	650	650	650	650	650	650	650			100	100	100		
IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																		

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti																			
1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	127	177	177	177	177	127	177	177			100	100	100			
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	127	177	177	127	177	177	177	177			139,4	100	100			
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	127	177	177	177	177	127	177	177			100	100	100			
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	127	177	177	177	177	127	177	177			100	100	100			
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	127	177	177	177	177	127	177	177			100	100	100			
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	127	177	177	177	177	127	177	177			100	100	100			
8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10	15	15	15	15	8	10	10			80	66,67	66,67			
9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	5	5	5	5	5	5	5	5			100	100	100			

10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti																		
1	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30			100	100	100		
2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30			100	100	100		
3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30			100	100	100		
4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30			100	100	100		
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30			100	100	100		
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30			100	100	100		
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30			100	100	100		

8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30			100	100	100		
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti																		
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72			100	100	100		
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72			100	100	100		
3	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72			100	100	100		
4	Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	5	2	2	2	2	5	2	2			100	100	100		
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72			100	100	100		
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72			100	100	100		
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72			100	100	100		

8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
11	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	25	25	25	25	25	20	18	9			80	72	36		
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti																		
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		

6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
8	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti																		
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	5	5	15	15	15			100	100	100		
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	5	5	15	15	15			100	100	100		
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	5	5	15	15	15			100	100	100		
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	5	5	15	15	15			100	100	100		
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	5	5	15	15	15			100	100	100		
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	5	5	15	15	15			100	100	100		

8	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																		
1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal																		
1	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	15	15	15	15	15	15	15	15			100	100	100		
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi																		
2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	412	401	50	48	100	412	401	0			100	100	0		
VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA																		
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi																		
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			100	100	100		

3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	5	5	5	5	5	0	0	0			0	0	0		
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																		
1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Unit	578	578	578	578	578	578	578	578			100	100	100		
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																		
1. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan																		
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL																		
1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi																		
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																		
1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																		
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																		
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100		

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																		
1. Penyediaan Profil Kependudukan																		
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100		

Berdasarkan Tabel 2.4 mengenai capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2022-2025 diketahui bahwa keseluruhan target tercapai.

Sedangkan gambaran Capaian kinerja keuangan Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2022-2025 disajikan pada tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan serta Rasio antara Anggaran dan Realisasi Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi

No	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun					Rata rata pertumbuhan
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110.081.250	169.665.855	388.288.976	330.625.100		99.376.130	169.441.480	293.957.895			90,28	99,87	75,71			
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.611.389.226	16.903.780.847	16.558.754.753	16.575.207.119		16.428.580.247	16.445.826.573	16.454.115.420			98,90	97,29	99,37			
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	457.763.000	289.150.000	180.840.000	227.721.000		424.741.940	279.360.000	172.580.000			92,79	96,61	95,43			
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	59.500.000	11.000.000	18.999.900		-	16.250.000	0			0,00	27,31	0,00			
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah																	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.382.762	53.457.862	21.194.600	8.563.690		69.322.500	53.035.240	21.194.600			98,49	99,21	100,00			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	987.763.070	408.932.707	99.930.420	38.917.550		934.741.290	362.246.446	73.244.620			94,63	88,58	73,30			
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.311.212	247.358.600	93.368.480			79.023.013	241.557.750	73.247.500			99,64	97,65	78,45			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.008.300	-	213.022.009	28.040.640		59.875.750	-	143.770.150			79,83		67,49			
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.150.005.173	997.042.100	512.748.171	291.437.482		939.687.540	974.279.634	421.712.531			81,71	97,72	82,25			
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			411.092.000	0				405.460.000					98,63			
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		444.676.000	0	0			437.000.000					98,27				
3	Pengadaan Mebel	146.462.846	18.628.000	0	0		123.334.052	12.668.400				84,21	68,01	#DIV/0!			
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	534.768.118	575.565.753	534.564.630	712.358.400		443.014.899	505.935.096	532.667.887			82,84	87,90	99,65			
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		238.407.550	720.999.806	719.736.190			233.496.495	568.151.104				97,94	78,80			
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	659.700.000	696.330.000	798.120.000	478.380.000		626.994.735	674.844.117	583.486.394			95,04	96,91	73,11			
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.437.906.740	296.849.160	0	11.950.000		1.430.559.248	296.705.000	0			99,49	99,95				
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.500.000	84.530.000	22.470.000	40.480.000		97.610.000	82.570.764	22.470.000			99,10	97,68	100,00			
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																	
1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi																	

	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	74.834.026	5.500.000	0	13.583.200	63.461.486	5.090.000	0			84,80	92,55				
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	418.589.975	404.982.068	265.507.536	221.050.000	401.035.926	392.309.722	251.686.000			95,81	96,87	94,79			
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	535.373.864	506.441.378	316.494.664	304.174.000	520.543.200	500.693.871	289.659.000			97,23	98,87	91,52			
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.295.140.766	1.956.066.411	1.433.214.000		1.263.715.872	1.930.095.775	1.404.756.200			97,57	98,67	98,01			
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	628.147.038	484.794.018	297.999.972	245.001.900	535.623.413	473.376.569	159.665.992			85,27	97,64	53,58			
III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																
1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota																
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	190.000.000	233.479.126	300.001.450	246.987.200	176.368.500	223.879.033	267.766.300			93	96	89			
IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti																
1	Penyediaan Permakanan	1.464.488.301	1.729.411.311	1.670.301.700	1.657.710.000	1.256.547.360	1.506.936.111	1.638.149.361			86	87	98			
2	Penyediaan Sandang	145.060.141	174.906.100	218.049.662	88.284.379	141.732.000	167.534.650	214.354.000			98	96	98			
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.937.150.894	1.227.152.762	1.504.128.393	1.017.996.780	2.868.246.688	1.067.214.500	1.462.026.606			98	87	97			
4	Penyediaan Alat Bantu	1.116.222.923	47.871.784	0	2.780.000	959.732.541	47.164.961	0			86	99	#DIV/0!			
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	51.813.237	47.871.784	21.552.680	18.548.300	51.625.900	47.164.961	21.407.000			100	99	99			

6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	83.941.500	154.047.000	271.334.400	78.400.000		73.573.500	153.981.000	227.420.950			88	100	84			
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	94.175.000	27.238.388	20.992.672	13.726.040		94.175.000	26.100.000	0			100	96	0			
8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	171.171.000	37.500.000	60.297.798	41.796.000		125.976.900	37.107.500	30.955.000			74	99	51			
9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	122.650.000	37.500.000	37.500.000	7.921.000		108.495.000	37.371.000	0			88	100	0			
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		70.000.000	80.000.000	179.807.000			69.854.170	64.095.636				100	80			
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti																	
1	Pengasuhan	2.897.156	482.319	10.837.094	2.243.000		2.655.826	472.860	0			92	98	0			
2	Penyediaan Makanan	323.947.431	418.992.700	402.290.000	324.167.104		246.316.331	348.665.500	375.005.750			76	83	93			
3	Penyediaan Sandang	71.303.730	74.544.390	70.682.190	46.655.776		66.437.059	73.015.912	64.733.000			93	98	92			
4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	873.432.040	1.279.351.544	363.910.526	389.066.166		815.466.210	1.257.233.630	337.369.520			93	98	93			
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	10.098.060	9.068.157	5.203.044	5.282.477		6.083.496	8.954.400	5.023.044			60	99	97			
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	74.705.727	65.717.961	78.187.746	42.194.322		60.262.309	56.018.867	53.538.848			81	85	68			
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	63.699.290	107.698.434	170.507.684	51.711.120		44.168.355	106.697.992	120.289.600			69	99	71			
8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	66.011.649	113.045.381	134.263.486	129.400.000		27.445.500	113.036.250	107.628.725			42	100	80			
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		110.000.000	0	13.090.000			109.783.358	0				100				
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti																	
1	Penyediaan Permakanan	799.131.000	823.746.600	785.629.000	801.000.000		580.528.085	691.778.996	710.545.589			73	84	90			
2	Penyediaan Sandang	189.683.260	160.080.537	104.040.000	24.480.000		188.633.243	159.817.230	102.897.000			99	100	99			
3	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	1.110.489.225	1.068.681.367	516.169.830	166.018.484		1.103.298.410	1.066.231.686	477.143.806			99	100	92			
4	Alat Bantu		5.504.000	5.539.014	200.614.951			5.504.000	0			#DIV/0!	100	0			
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	8.890.184	9.872.712	4.785.531	71.100.000		8.890.184	9.872.712	0			100	100	0			

6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	29.700.000	35.294.880	35.100.000	57.285.322		29.700.000	35.294.880	35.100.000			100	100	100			
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.135.007	69.354.648	68.350.248			73.855.400	69.026.400	68.187.744			100	100	100			
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	3.450.000	2.700.000	2.700.000	1.350.000		3.450.000	2.700.000	0			100	100	0			
11	Pemulasaraan	59.840.000	47.872.000	32.500.000	25.000.000		21.542.360	33.509.000	10.000.000			36	70	31			
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	34.074.000	69.930.000	58.804.991	11.562.287		31.558.524	68.907.811	0			93	99	0			
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti																	
1	Penyediaan Permakanan	27.572.400	140.814.100	66.594.000	106.695.000		13.797.000	90.526.600	63.671.000			50	64	96			
2	Penyediaan Sandang	77.242.071	162.679.315	35.211.078	14.108.762		73.865.778	154.629.300	30.502.500			96	95	87			
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	221.772.066	71.330.140	76.729.650	76.724.664		213.997.666	60.736.200	74.170.000			96	85	97			
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		13.089.606	4.331.719	5.939.281			12.277.200	4.191.100			#DIV/0!	94	97			
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	44.181.538	106.443.275	27.186.075	9.775.415		40.191.186	102.129.600	0			91	96	0			
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	63.399.354		52.070.000	6.900.000		63.396.515		45.970.000			100		88			
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			6.425.000	2.444.843				0					0			
8	Pemulangan ke Daerah Asal	78.270.371	22.668.500	45.461.200	28.000		69.192.926	20.820.000	36.165.400			88	92	80			
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	0	37.500.000	0	84.000		0	37.294.500	0				99				
5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti																	
1	Penyediaan Permakanan	31.622.400	204.462.550	71.685.000	106.695.000		30.969.000	140.353.334	34.359.400			98	69	48			

2	Penyediaan Sandang	59.708.935	99.946.446	56.668.139	11.580.600		59.262.700	88.632.700	52.945.100			99	89	93			
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	589.825.187	364.998.720	123.330.000	78.946.104		588.696.000	362.227.360	117.902.000			100	99	96			
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	7.204.964	8.940.092	5.065.022	3.755.242		7.083.190	8.939.200	5.053.000			98	100	100			
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	72.967.600	41.096.903	67.950.000	9.899.800		72.767.400	39.605.900	67.075.000			100	96	99			
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	17.948.700	112.673.220	57.870.900	3.482.059		17.598.500	100.898.700	52.145.000			98	90	90			
8	Pemulangan ke Daerah Asal	115.464.209	4.500.000	3.500.000	11.250.000		65.752.300	4.500.000	2.500.000			57	100	71			
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		59.745.000	65.888.000	133.893.500			59.745.000	56.226.800			#DIV/0!	100	85			
V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																	
1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal																	
1	Pengangkatan Anak antar WNI	146.310.588	130.260.286	167.990.700	44.067.570		131.129.191	126.895.286	150.582.531			90	97	90			
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi																	
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		100.934.134		1.452.391.500			94.962.159					94				
2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	696.739.643	273.599.500	160.118.000	116.924.000		618.159.700	253.866.971	104.154.000			89	93	65			
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	740.000.000	1.174.892.668	325.882.000	175.873.300		740.000.000	1.148.773.330	90.582.800			100	98	28			
VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA																	
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi																	
1	Penyediaan Permakanan	234.463.700	532.840.456	359.120.000	382.763.800		229.292.079	529.018.982	358.464.100			98	99	100			
2	Penyediaan Sandang		44.600.000		53.098.400			44.600.000				#DIV/0!	100	97			
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.974.600	258.275.612	20.880.000	13.000.000			258.275.000	20.200.000			0	100	94			

4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				16.489.636												
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	592.754.920	247.829.778	76.000.000	14.843.000		553.681.817	241.127.872	71.202.600			93	97				
VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																	
1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																	
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		20.892.034		21.811.000			20.846.514					100				
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	195.397.512	140.423.070	21.801.678	50.181.575		183.407.212	140.178.590	20.842.720			94	100	96			
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	164.937.256	145.563.016	81.961.120	72.000.000		157.228.300	141.961.507	81.940.000			95	98	100			
VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																	
1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan																	
1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	0	58.557.437					54.100.934					92				
2	Pendataan Penduduk NonPermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	0	52.099.900					45.644.942					88				
1. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan																	
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	118.694.566	110.574.808	637.993.479	63.852.040		84.713.731	107.811.858	339.428.429			71	98	53			
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan																	
2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk		59.000.000					58.847.442					100				
IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL																	
1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi																	
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	106.583.700	229.721.627	217.971.000	58.626.000		75.338.129	228.625.091	153.615.990			71	100	70			
2. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																	

1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		77.726.890					76.949.150									
X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																	
1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																	0
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	73.123.100	68.586.786	106.061.000	36.392.000		64.595.740	60.527.506	80.657.481			88	88	76	0		
2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		56.876.000					55.388.016					97		0		
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																	
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	346.804.866	141.805.309	146.884.000			316.982.429	135.267.471	132.231.205			91	95	90			
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		40.000.000		87.673.900			39.856.531					100				
XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																	
1. Penyediaan Profil Kependudukan																	0
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	24.018.467	48.467.778	8.115.210	5.796.000		22.027.700	41.747.600	0			92	86	0	0		
		42.783.073.008	39.729.041.670	33.010.013.126	29.260.596.204		40.320.226.934	38.026.035.577	30.512.240.928			94	96	92	0		

Disamping itu Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan salah satu dinas sebagai perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemenuhan SPM menjadi syarat mutlak bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Gambaran terhadap capaian kinerja SPM tahun 2022-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6.
Capaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output										Total Pencapaian
			2022		2023		2024		2025		2026		
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM												
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	127	127	157	157	177	177	177		177		
	2 . Penyediaan sandang	Orang	127	127	157	157	177	177	177		177		
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	127	127	157	157	177	177	177		177		
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	127	127	157	157	177	177	177		177		
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	127	127	157	157	177	177	177		177		
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	127	127	157	157	177	177	177		177		
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	127	127	157	157	177	177	177		177		
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	25	25	25	25	25	25	25		25		
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	30	30	50	50	50	50	50		50		
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	20	20	20	20	20	20	20		20		
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	10	9	10	10	10		10		

2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti											
	1 . Pengasuhan	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	3 . Penyediaan sandang	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti											
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	2	0	0	0	0	0	0	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72	72	

6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	0	0	0	0	0	0	0		
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
12 . Pemulasaraan	Orang	25	23	25	18	25	23	25	25	25		
4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti												
1 . Penyediaan permakanan	Orang	15	15	15	15	10	6	6	6	6		
2 . Penyediaan sandang	Orang	15	15	15	15	10	6	6	6	6		
3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	15	15	15	15	10	6	6	6	6		
4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	15	15	15	15	10	6	6	6	6		
5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15	15	15	15	10	6	6	6	6		
6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	15	15	15	15	10	6	6	6	6		
7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	15	15	15	15	10	6	6	6	6		
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	15	15	15	15	10	6	6		6		
	10 . Pemulangan ke daerah asal	Orang	5	2	5	0	0	0	0		0		
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi												
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	600	600	600	600	600	600	600		600		
	2 . Penyediaan sandang	Orang	100	100	100	100	100	100	100		100		
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	5	2	3	0	2	0	2		2		
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	100	100	100	100	100	100	100		100		
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	100	100	100	100	100	100	100		100		

Pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi didalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan di Provinsi Jambi, sebagaimana table berikut :

Tabel 2.7
Data Cakupan Pelayanan Admindukcapil
Provinsi Jambi

No	Jenis Layanan	Populasi (baseline 2024)	Data Layanan				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Penerbitan KTP-el	2.695.431	2.428.841	2.561.275	2.591.234	2.695.431	2.836.878
2	Penerbitan KK	1.201.141	782.851	1.168.976	1.194.053	1.201.141	1.227.053
3	Akta Kelahiran	1.142.596	1.023.986	1.052.311	1.100.128	1.142.596	1.131.899
4	Akta Kematian	54.600	3.075	16.920	33.730	54.600	64.373
5	SKPWNI (Surat Keterangan Pindah WNI)	72.291	69.616	79.543	81.984	72.291	32.906
6	Akta Cerai (non muslim)	385	176	242	313	385	422
7	Perjanjian Kerjasama	11	4	9	11	11	6
8	Data penduduk	3.834.439	3.603.439	3.696.044	3.760.275	3.834.439	3.864.773

2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, sasaran pelayanan dikelompokkan sesuai dengan beban dan tanggung jawab organisasi. Kelompok sasaran pelayanan terfokus pada Pemerlu Atensi Sosial (PAS) pada urusan Sosial dan layanan admindukcapil pada Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun Kelompok Sasaran Pelayanan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. Anak-Anak Rentan
- b. Difabel
- c. Lansia Terlantar
- d. Mereka yang Berpendapat Rendah
- e. Korban Bencana
- f. Afirmasi Khusus

- g. Warga Binaan
- h. Korban Kekerasan
- i. Korban Napza dan HIV/AIDS
- j. Mereka yang Difabel Bermasalah Sosial
- k. Perempuan Rentan
- l. Fakir Miskin
- m. Layanan admindukcapil

Tabel 2.8
Data Pemerlu Atensi Sosial (PAS)
Provinsi Jambi

No	Nama PAS	Populasi (baseline 2025)	Yang telah tertangani (Tahun) (Orang)				
			2021	2022`	2023	2024	2025
1	Anak-Anak Rentan	9.140	50	30	55	30	30
2	Difabel	8.049	0		964	0	0
3	Lansia Terlantar	12.685	72	72	97	72	72
4	Berpendapat Rendah	307	15	15	15	15	6
5	Korban Bencana	17.381	870	7240	7380	1487	400
6	Afirmasi Khusus	3.914	505	619	701	754	664
7	Korban Kekerasan	50	0	0	0	0	0
8	Korban Napza dan HIV/AIDS	60	0	0	0	0	0
9	Warga Binaan	78	0	0	0	0	0
10	Bermasalah Sosial Psikologis	6.695	0	0	0	0	0
11	Perempuan Rentan	4.221	0	0	0	0	0
12	Fakir Miskin	288.583	30	370	460	0	48

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan

Mitra kerja yang saling mendukung dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah dalam provinsi serta instansi pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi jambi.

Adapun Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia
2. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Bappeda Provinsi Jambi

4. BPKPD Provinsi Jambi
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
6. Dinas DP3AP2 Provinsi Jambi
7. BPJS Kesehatan Provinsi Jambi
8. RSUD Rd Mattaheer Provinsi Jambi
9. RSJ M Syukur Provinsi Jambi
10. KPU Provinsi Jambi
11. Dinas Sosial Kabupaten/Kota
12. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota
13. Organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial
14. SDM Kesejahteraan Sosial (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial – PSKS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Data PSKS Provinsi Jambi yang menjadi Mitra dalam Pembangunan kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Provinsi Jambi

No	Data PSKS	Jumlah	Ket
1	Pekerja Sosial Profesional	12	Kota jambi, Sarolangun, Batanghari dan Kerinci)
2	Pekerja Sosial Masyarakat	450	Desa/Kel
3	Taruna Siaga Bencana	615	Provinsi
4	Karang Taruna	1562	Desa/Kel
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial	12	Kab/Kota dan Provinsi
6	Keluarga Pionir	1	Liposos (program Pusat)
7	Penyuluh Sosial	30	Kab/Kota
8	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	144	Kecamatan
9	Pendamping PKH	544	Desa/Kel
10	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	1.976	Ketua Tp PKK Prov, Kab, kec dan Desa, BKOW, TKSK, PSM dan LKS
11	Dunia Usaha (yang berpartisipasi dalam CSR)	27	Perusahaan
12	Lembaga Kesejahteraan Sosial		
	LKS Anak	62	Kab/Kota
	LKS Lanjut Usia	34	Kab/Kota
	LKS Orang Dengan Kecacatan	4	Kab/Kota
	LKS Tuna Sosial	2	Kab/Kota

2.2. PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Secara Umum Permasalahan yang dihadapi dalam Pelayanan di Urusan Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut :

1. Cakupan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) dengan Sumber Daya yang Tersedia Belum seimbang
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, TTPO, dan Kelompok Rentan serta Terpencil belum Optimal dalam masalah Logistik Koordinasi dan Pembiayaan.
3. Belum Optimalnya Pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTD karena keterbatasan SDM, Sarana dan Prasarana belum memadai.
4. Penanganan PAS Dalam Panti belum fokus pada satu Pelayanan.
5. Data yang tersedia belum Konsisten dikarenakan belum Optimalnya Pengelolaan data di Daerah.
6. Minimnya Dukungan Anggaran APBD Terhadap Strategi Penanganan Kemiskinan.
7. Belum Optimalnya SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
8. Kurangnya Anggaran APBD dalam Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi.
9. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Kegiatan Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Belum Optimalnya Partisipasi dan Literasi kepada Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan.
11. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan.

2.3. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mendukung tugas Pemerintah Provinsi Jambi di bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi antara lain:

1. menyediakan prasarana dan sarana Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan fungsi pelayanan ini, faktor-faktor yang sering mempengaruhi fungsi pelayanan antara lain:

1. perumusan kebijakan anggaran dan regulasi;
2. SDM Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Standar mutu layanan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah Persentase PAS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial, Advokasi dan Rehabilitasi, serta persentase PAS yang aktif. Sedangkan pada urusan administrasi kependudukan fokus prioritas adalah pada Persentase perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Secara spesifik disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Teknik menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS SOSIALDUKCAPIL	PERMASALAHAN DINAS SOSIAL DUKCAPIL	ISU KLHS RELEVAN DENGAN DINAS SOSIAL DUKCAPIL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SOSIAL			ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL DUKCAPIL
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan dan pemanfaatan Data	Konsolidasi data belum sempurna	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Dampak global lingkungan tidak tergambar dalam data yang lengkap	Data yang ada tidak dapat mengantisipasi dampak dan resiko akibat dampak lingkungan	Pengintegrasian data program antisipasi dampak lingkungan belum terintegrasi dengan data kependudukan	Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Admindukcapil
Infrastruktur dan SDM pelayanan dasar	Terbatasnya infrastruktur dan SDM pelayanan dasar	Kinerja layanan jasa ekosistem	Dampak lingkungan yang buruk memerlukan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Perubahan lingkungan menyebabkan peningkatan pemerlu atensi sosial terhadap pelayanan dasar	Disparitas antara pemerlu atensi sosial dengan infrastruktur pelayanan dasar yang tersedia	
Partisipasi masyarakat	Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap kebijakan dan program kesejahteraan sosial	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Daya dukung lingkungan menjadi penting dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan	Daya dukung lingkungan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan	Keterlibatan masyarakat dan daya dukung lingkungan berkitat dalam pembangunan berkelanjutan	

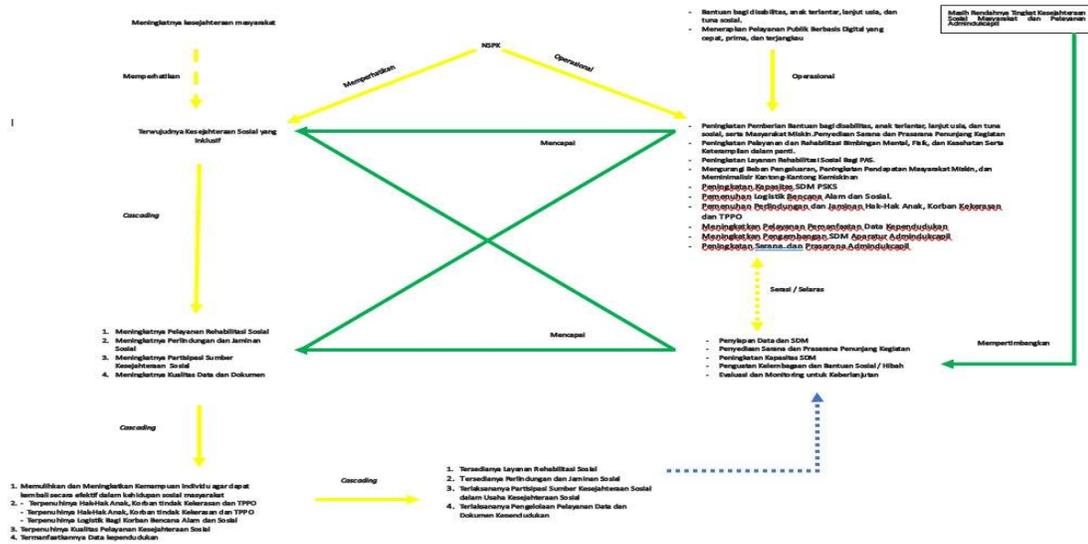
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

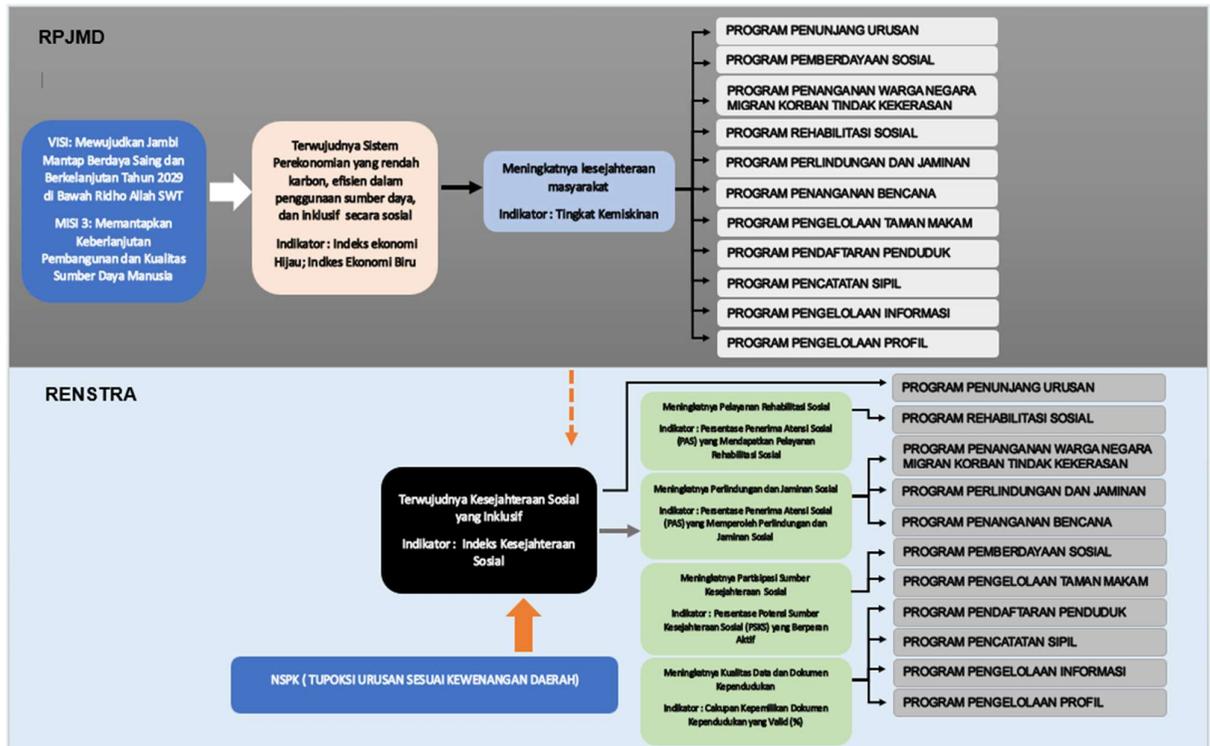
Tujuan perangkat daerah khususnya Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada prinsipnya disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana ada 2 (dua) urusan yang mendasari yaitu Urusan Sosial dan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perumusan tujuan perangkat daerah diambil dari filterisasi dari kedua urusan tersebut dalam suatu pernyataan terhadap eksistensi organisasi. Secara skematis dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Berdasarkan NSPK yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital, maka disepakati rumusan tujuan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yaitu : ***Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien.*** Secara spesifik alur hubungan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati, dengan mempertimbangkan kondisi perangkat daerah maka perumusan sasaran organisasi akan diturunkan sesuai dengan bidang urusan yaitu Urusan Sosial dan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara spesifik rumusan sasaran organisasi yang ditetapkan dalam renstra perangkat daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya Pelayanan Kualitas Data dan Dokumen Kependudukan

Untuk lebih jelasnya teknik merumuskan tujuan dan sasaran renstra yang dilengkapi dengan Indikator dan target tahunan, kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			Tingkat Kemiskinan	7,1	6,76	6,5	5,75	4,66	4,63	
	Terwujudnya Kesejahteraan yang Inklusif IK : Indeks Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penerima Atensi Sosial (PAS) yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Atensi Sosial (PAS) yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif	100	100	100	100	100	100	
Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital			Indeks Pelayanan Publik	3,67	3,87	4,01	4,12	4,21	4,35	
	Terwujudnya Kesejahteraan yang Inklusif IK : Indeks Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Data dan Dokumen Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Valid (%)	92	93	94	95	96	98	

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas diperlukan penahapan strategi dalam renstra perangkat daerah, sehingga adanya rasionalisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun strategi renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan Data dan SDM	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM	Penguatan Kelembagaan dan Bantuan Sosial / Hibah	Evaluasi dan Monitoring untuk Keberlanjutan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan suatu rangkaian operasionalisasi NSPK yang akan diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD dan menjadi Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan bagi disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, dan tuna sosial.	Peningkatan Pemberian Bantuan bagi disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, dan tuna sosial, serta Masyarakat Miskin.	
			Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Bimbingan Mental, Fisik, dan Kesehatan Serta Keterampilan dalam panti.	
			Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi PAS.	
			Mengurangi Beban Pengeluaran, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin, dan Meminimalisir Kantong-Kantong Kemiskinan.	
			Peningkatan Kapasitas SDM PSKS	
			Pemenuhan Logistik Bencana Alam dan Sosial.	
			Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Hak-Hak Anak, Korban Kekerasan dan TPPO	
2	Peningkatan Cakupan Pelayanan Admindukcapil	Menerapkan Pelayanan Publik Berbasis Digital yang cepat, prima, dan terjangkau	Meningkatkan Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Meningkatkan Pengembangan SDM Aparatur Admindukcapil	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Admindukcapil	

BAB IV

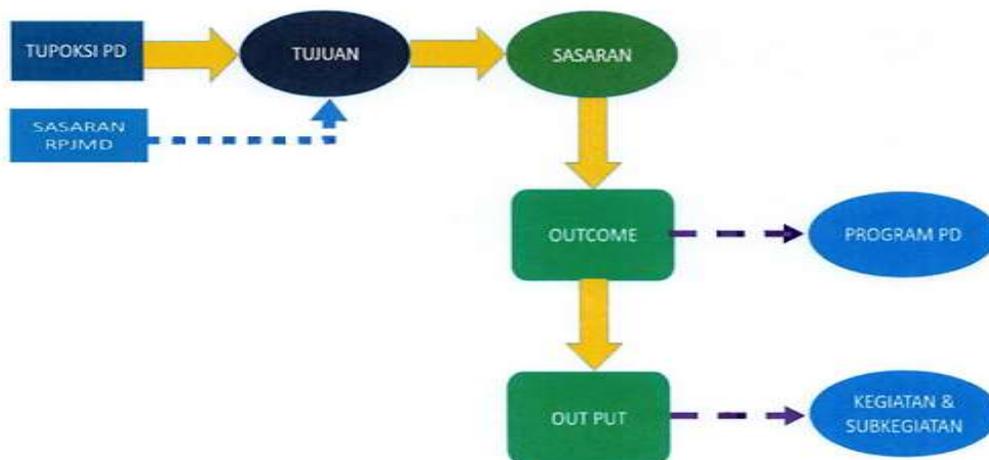
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output berdasarkan siklus peyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimana nomenklatur Program, kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri termasuk pemutahirannya.

Sedangkan daftar Program, kegiatan dan Subkegiatan dalam mencapai target kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dimana Program, kegiatan dan Subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu sebagai pijakan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2030, gambaran kerangka perumusan Program, kegiatan dan Subkegiatan tergambar pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Program, kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Teknik merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya Kesejahteraan yang Inklusif IK : Indeks Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Memulihkan dan Meningkatkan Kemampuan Individu agar dapat kembali secara efektif dalam kehidupan sosial masyarakat	Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial	Tingkat Kemiskinan Persentase Penerima Atensi Sosial (PAS) yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
						Pemulasaraan	
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan							

						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
						Pengasuhan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Penyediaan Permakanan	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
						Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	
						Pemulasaraan	
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	
						Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
						Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	

						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Pemulasaraan	
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	
						Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
						Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemulangan ke Daerah Asal	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	
						Pemulasaraan	
						Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
						Penyediaan Permakanan	

						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
						Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
						Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemulangan ke Daerah Asal	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	
						Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
						Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
						Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
						Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	
						Pemulasaraan	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Tersedianya Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Atensi Sosial (PAS) yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial		
			Terpenuhinya Hak-Hak Anak, Korban tindak Kekerasan dan TPPO			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
						Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	

						dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pemutakhiran DTSEN			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
						Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
						Pengangkatan Anak antar WNI	
						Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
						Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	
						Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	
						Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Terpenuhinya Logistik Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
						Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
						Penyediaan Permakanan	
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
						Pelayanan Dukungan Psikososial	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
						Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
						Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
						Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
						Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	

						Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
						Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	
						Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
						Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
						Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
		Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
						Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
						Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
						Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	
						Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
						Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
						Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	

						Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	
						Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	
						Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota	
						Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	
						PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
						Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
						Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
						Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
						Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
						Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif IK : Indeks Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Data dan Dokumen Kependudukan	Termanfaatkannya Data kependudukan.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Data dan Dokumen Kependudukan.	Indeks Pelayanan Publik		
					Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Valid (%)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
						Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
						Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	
						Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	
						Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	
						Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	
						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	

						Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak terkait Pendaftaran Penduduk	
						Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
						Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
						Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	
						Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	
						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	
						Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
						Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
						Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
						Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
						Pelayanan Pencatatan Sipil	
						Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	
						Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	
						Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	
						Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak terkait Pencatatan Sipil	
						Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	

						Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	
						Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	
						Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	
						Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
						Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
						Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
						Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	

						Kerja Sama dengan Organisasi Ke Masyarakatan dan Perguruan Tinggi	
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
						Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
						PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
						Penyediaan Profil Kependudukan	
						Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	
						Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	

Pemenuhan Kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan memerlukan pendanaan untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tercantung dalam tabel 4.2 dibawah ini;

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					42.047.000.000,00		44.450.000.000,00		50.113.000.000,00		47.885.000.000,00		49.497.000.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.095.000.000,00		7.886.000.000,00		8.388.000.000,00		9.114.000.000,00		9.746.000.000,00	
Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Predikat)	A	A	A	6.000.000.000,00	A	6.600.000.000,00	A	7.000.000.000,00	A	7.500.000.000,00	A	8.000.000.000,00	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Predikat)	B	B	BB	617.000.000,00	BB	736.000.000,00	BB	788.000.000,00	BB	914.000.000,00	A	946.000.000,00	
Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	478.000.000,00	BB	550.000.000,00	BB	600.000.000,00	BB	700.000.000,00	A	800.000.000,00	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					25.827.000.000,00		26.929.000.000,00		31.485.000.000,00		28.381.000.000,00		29.506.000.000,00	
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pekerja sosial/tenaga kerja sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase pekerja sosial/tenaga kerja sosial dan / relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana Provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		

	persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	56.9	64.8	72.7		80.7		88.6		96.6		100	
	persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	N/A	2.6	2.62		5.2		10.47		15.7		20.94	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					75.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	96.6	96.6	97.5	75.000.000,00	97.8	85.000.000,00	97.9	90.000.000,00	98	90.000.000,00	100	95.000.000,00
	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang)	671	650	700		700		700		700		700	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					7.500.000.000,00		8.000.000.000,00		8.500.000.000,00		8.500.000.000,00		8.500.000.000,00
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.8	1.8	2		2		2		2		2	
	persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0.22	0.22	0.22		0.22		0.22		0.22		0.22	
	persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0.35	0.36	0.36		0.37		0.37		0.37		0.37	
	persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	12.5	15.6	15.6		15.6		20.83		20.83		20.83	
	persentase pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13.25	22.09	22.09		22.09		22.09		22.09		22.09	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		800.000.000,00		650.000.000,00

	persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	0.20	0.22	0.25		0.27		0.30		0.32		0.35		
	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	1.4	1.4	1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					800.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00	
	Persentase korban bencana alam, sosial dan / atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase masyarakat di rawan bencana yang meningkat kesiap siagaannya	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
	persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik	100	100	100		100		100		100		100		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00	
	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	4.9	20	21		22		23		24		25		
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	56.31	60	65		70		75		80		85		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00	
Outcome1	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil (%)	98	98	99	300.000.000,00	1	350.000.000,00	99	400.000.000,00	99	450.000.000,00	100	500.000.000,00	
	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100		100		100		100		100		

	persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	98	98	98		98		98		98		98		
	persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100		100		100		100		100		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					262.000.000,00		272.000.000,00		283.000.000,00		293.000.000,00		300.000.000,00	
	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	100	100	100		100		100		100		100		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					9.000.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00	
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100		100		100		100		100		

Dari rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan beserta Pendanaannya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 diatas, dengan mempertimbangkan kondisi perangkat daerah dan kemampuan fiskal daerah, tidak semuanya mampu didanai dalam proses penganggaran APBD. Oleh karena itu perlu disusun daftar Subkegiatan prioritas yang wajib di danai untuk mendukung Program-Program Prioritas diantaranya.

Secara spesifik Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, disajikan pada Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
			Pemulasaraan	
			Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	

			Pengasuhan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Penyediaan Permakanan	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	
			Pemulasaraan	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	
			Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemulasaraan	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	
			Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	

			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemulangan ke Daerah Asal	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	
			Pemulasaraan	
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemulangan ke Daerah Asal	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	

			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
			Pemulasaraan	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkanya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
			Pengangkatan Anak antar WNI	
			Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
			Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	
			Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
			Penyediaan Permakanan	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
			Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
			Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
			Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	

			Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
			Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	
			Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
			Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
			Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	
			Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
			Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
			Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	
			Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	

			Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
			Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
7	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	
			Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admuduk terkait Pendaftaran Penduduk	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
			Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	
			Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	
			Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
			Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
8	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admuduk terkait Pencatatan Sipil	
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	
			Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	
			Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	

9	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan data administrasi kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admindak Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	
			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	

5.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil gubernur Jambi Tahun 2025-2029 di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman dalam pencapaian target-target pemerintah.

Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, secara spesifik IKU Perangkat Daerah disajikan pada tabel 4.4 berikut;

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penerima Atensi Sosial (PAS) yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penerima Atensi Sosial (PAS) yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Valid (%)	Angka	92	93	94	95	96	98	

5.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Penyusunan dan penetapan target penyelenggaraan urusan Sosial dan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pencapaian target IKK ini akan menggambarkan bahwa urusan pemerintahan dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat. Secara spesifik IKK Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 5.....

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	
7.	Pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 yang berisikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, beserta Indikator-Indikator Kinerjanya diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja organisasi dalam Kurun waktu 5 Tahun. Disamping itu juga disusun Renstra tahun 2030 yang merupakan tahun transisi sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja perangkat daerah untuk tahun 2030

Dokumen Renstra ini juga dapat mempertegas fungsi, tugas, peran, dan posisi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam kaitannya dengan pembangunan secara keseluruhan pada umumnya dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Khususnya. Namun demikian pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak dan pemangku kebijakan yang berperan aktif dalam pembangun bidang kesejahteraan sosial. Oleh karenanya Renstra ini juga dapat memberikan gambaran fungsi, tugas, dan peran dalam pelaksanaan program-program untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian Renstra mampu memberikan gambaran secara utuh tahapan-tahapan Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam setiap Tahunnya.

Jambi, 2025

Kepala Dinas Sosial,
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jambi



Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19730624 199403 1 003